

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan April 1939 hubungan bilateral antara negara Amerika Serikat (AS) dan Turki telah dimulai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama perdagangan. Lebih lanjut, hubungan kerjasama ini juga membahas mengenai aspek demokrasi, *freedom*, fokus terhadap hak asasi manusia, aturan hukum, dan *free-market economy*.¹ Aspek di atas menysasar pada bidang keamanan dan militer, penanganan terorisme, perdagangan dan investasi, pariwisata, sektor politik, pendidikan dan teknologi, serta agrikultur dan *food security*.²

Melihat manfaat dari kerjasama ini, maka kedua negara ini memutuskan untuk mempertahankan hubungannya guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara. Manfaat ini dapat dilihat dari AS yang memiliki hak istimewa dalam melakukan ekspor dan impor³, dimana produk industrinya akan menerima pengurangan tarif sekitar 12-28%.⁴

Di dalam perjalanannya banyak tantangan yang dihadapi kedua negara ini. Ditandai dengan keputusan negara Turki pada tahun 1975 untuk menutup sebagian besar instalasi pertahanan dan intelijen AS di Turki. Hal ini berlangsung selama embargo

¹ MFA. Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-united-states-of-america.en.mfa> (diakses pada 31 Oktober 2018).

² U.S. Department of State, "U.S. Relations With Turkey", U.S. Department of State (diakses pada 31 Oktober 2018 pukul 17.12), <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3432.htm>

³ Mehmet Nur Altınörs, "Turkish Foreign Policy during World War II," *Asian Journal of Social Science Studies* 2, No.4, (2017): 2.

⁴Ibid.

senjata AS kepada Turki yang merupakan wujud tanggapan terhadap intervensi militer Turki di Siprus.⁵

Di sisi lain, kondisi bilateral di atas tidak mempengaruhi posisi Turki di wilayah regionalnya. Posisi Turki masih tetap disegani dan dianggap sebagai negara yang memiliki peranan penting dalam lingkup regional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh negara Turki dimana membawanya menjadi penengah yang baik dalam beberapa konflik di regional.

Pada konflik yang terjadi di Suriah, Turki membantu menengahi Suriah dan Israel sejak bulan Mei 2008. Dikutip dari pernyataan Menteri Luar Negeri Suriah Walid Mualllem pada tahun 2010 “Turki telah menunjukkan dirinya sebagai penengah yang jujur. Pembicaraan tidak langsung itu, oleh karenanya, harus di bawah penengah Turki, dan mulai di Turki di tempat pembicaraan itu telah ditentukan.”⁶

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Turki ketika menyikapi masalah terkait sanksi embargo terhadap Iran oleh AS. Pada 2007 AS menjatuhkan sanksi embargo terhadap Iran, akibat pengembangan nuklir yang dianggap AS berlebihan dan mencurigakan. Turki memberikan dukungan kepada AS dalam bentuk pengurangan impor minyak dari Iran. Tidak hanya itu, pada tahun 2007 AS menyatakan keberatannya atas perjanjian yang dilakukan Turki dan Iran dimana Turki memfasilitasi ekspor gas alam dari Iran ke Eropa melalui Turki. Akhirnya Turki terpaksa mundur dari kesepakatan tersebut.⁷ Sikap ini bertolak belakang terhadap

⁵ Jim Zanotti dan Clayton Thomas, “Turkey: Background and U.S. Relations in Brief,” *Congressional Research Service*, (2018): 5.

⁶ Purwoko, Krisman. “Hanya Turki Bisa Jadi Penengah Suriah-Israel.” *Republika.com*. <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/04/137946-hanya-turki-bisa-jadi-penengah-suriah-israel>. (diakses 10 September 2018).

⁷ Purwoko, Krisman. “Hanya Turki Bisa Jadi Penengah Suriah-Israel.” *Republika.com*. <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/04/137946-hanya-turki-bisa-jadi-penengah-suriah-israel>. (diakses 10 September 2018).

sikap saat Turki menjadi penengah dalam konflik Suriah-Israel, dimana ia lebih memilih untuk tidak memihak salah satunya.

Tidak jauh berbeda dari tahun 2007, sanksi embargo terhadap Iran kembali diberikan AS pada tahun 2012 yang menekan Turki untuk mengikutinya. Akhirnya, sikap yang diambil Turki terkait sanksi embargo terhadap Iran juga tidak mengalami perubahan. Di tahun 2012 Turki melakukan pengurangan jumlah impor minyak kepada Iran hingga lebih dari 20%. Hal ini terpaksa dilakukan Turki menanggapi sanksi yang akan dijatuhkan AS kepada negara mitra dan aliansinya yang tidak menjalankan sanksi yang ditujukan kepada Iran tersebut.

Tabel 1.1
Penurunan Tingkat Pembelian Minyak Iran (oleh Negara Pembeli Utama)
(jumlah dalam barel/hari)

No	Negara/Blok	Pembelian 2011	Pembelian 2012
1	Uni Eropa (terkhusus Yunani, Italia dan Spanyol)	600.000	Diabaikan
2	China	550.000	380.000
3	Jepang	325.000	170.000
4	India	320.000	28.000
5	Korea Selatan	230.000	180.000
6	Turki	200.000	150.000
7	Afrika Selatan	80.000	0
8	Malaysia	55.000	30.000
9	Srilanka	35.000	20.000
10	Taiwan	35.000	20.000
11	Singapura	20.000	15.000
12	Lainnya	55.000	25.000
	Total	2,5 juta barel/hari	1,27 juta barel/hari

Sumber : fas.org, 2012

Menariknya pada Mei 2018, Iran kembali mendapatkan sanksi embargo dari AS pasca keluarnya AS dari perjanjian JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*)

yaitu perjanjian yang menyepakati pembatasan pengembangan nuklir Iran. Sanksi ini diikuti dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada negara-negara yang tidak bersedia menghentikan impor minyak dari Iran (khususnya bagi negara mitra AS).

AS melalui Senator Bon Menendez menyatakan "Hari ini kami memberi waktu tiga bulan kepada seluruh negara yang masih mengimpor minyak bumi dan produk minyak bumi dari Iran untuk secara signifikan mengurangi impor mereka. Jika tidak akan terancam dikenakan sanksi berat terhadap lembaga keuangan mereka."⁸ Lebih lanjut *Senior State Department Official U.S* menjelaskan bahwa AS menargetkan pada 4 November 2018, impor minyak Iran berada pada titik 0%.⁹ Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan diplomatiknya untuk mendesak, membujuk, bernegosiasi dengan mitra untuk mengurangi investasi Iran ke titik terendah (via teleconference).¹⁰

Berkaitan dengan sanksi embargo yang diterima Iran pada Agustus 2018, Turki menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Turki lebih memilih untuk tidak mengindahkan ancaman-ancaman yang diberikan AS apabila tidak menghentikan impor minyak dari Iran hingga 4 November 2018. Dikutip pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu dalam *press conference* pada bulan Juli 2018 di *Republic of Northern Cyprus, Lefkoşa* yaitu, "We do not have to adhere to the sanctions imposed on a country by another country. We don't find the sanctions right either."¹¹

⁸ Senior State Department Official. "Senior State Department Official On U.S Efforts to Discuss the Re-imposition of Sanction on Iran with Paertners Around the World." U.S Departmen of State Diplomacy in Action. (<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283512.htm>. (diakses pada 7 Oktober 2018).

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Compiled From Wire Service. "Turkey Not Obligated to Abide by Sanctions Imposed by US or UK Against Iran, FM Says." Daily Sabah.com. <https://www.dailysabah.com/diplomacy/2018/07/24/turkey-not-obliged-to-abide-by-sanctions-imposed-by-us-or-uk-against-iran-fm-says>. (diakses pada 6 Oktober 2018).

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Turki telah menyepakati untuk memperpanjang kontrak yang akan selesai di tahun 2020 untuk melakukan impor minyak dan gas alam dari Iran dengan memperpanjangnya hingga 2026 dengan mengimpor 9,6 BCM/tahun.¹² Selain itu, pada awal Agustus 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki, Fatih Dönmez mengatakan bahwa Turki akan melanjutkan perdagangan gas alam dengan Iran sesuai dengan kontrak jangka panjang yang ditandatangani dengan Teheran.”¹³

Keputusan Turki dalam menanggapi sanksi embargo AS terhadap Iran di tahun 2018 ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kejanggalan ditengah kedekatan hubungan bilateral Turki dan AS. Dapat diartikan bahwa Turki mengambil sikap dan tindakan perlawanan terhadap negara aliansinya. Kekhawatiran muncul jika dampak dari tindakan Turki ini dapat memicu perselisihan baru dengan AS, ditengah sanksi embargo yang juga ia terima dari AS pada Agustus 2018 setelah ditahannya pendeta Andrew Brunson pada 2016. Akibat sanksi embargo AS ini, Turki mengalami krisis ekonomi yang buruk, serta penurunan nilai mata uang Lira. Hubungan bilateral ini menjadi semakin panas dengan ditambahnya sikap perlawanan Turki terhadap ancaman AS.

Pada dasarnya sejak hubungan bilateral antara Turki dan AS terjalin, banyak keuntungan-keuntungan yang diterima Turki dari hubungan ini. Baik itu dari bidang politik, ekonomi, keamanan dan juga yang lainnya. Salah satu keuntungan yang diterima Turki yaitu, bergabungnya Turki dengan *The North Treaty Organization*

¹² Ole Gunnar Austvik dan Gulmira Rzayeva, “Turkey in the Geopolitics of Natural Gas,” *M-RCBG Associate Working Paper Series*, No. 66, (2016): 7.

¹³ Compiled From Wire Service. “With Long Term Contract Turkey to Continue Natural Gas Trade with Iran.” Daily Sabah.com. <https://www.dailysabah.com/energy/2018/08/09/with-long-term-contract-turkey-to-continue-natural-gas-trade-with-iran>. (diakses pada 12 September 2018).

(NATO) pada tahun 1952.¹⁴ Keanggotaan Turki di NATO membantunya dalam menangani posisi keamanan terkait konfliknya dengan Rusia di wilayah perbatasan. Uni Soviet menginginkan agar penempatannya dengan Turki di daerah-daerah timur Anatolia dapat dinormalisasikan guna mendesak negaranya, Armenia dan Georgia. Salah satu deputi kepala negara, Lavrentiy Beria, "membisikkan" kepada Stalin (Presiden Uni Soviet) bahwa kekuatan di barat-daya Georgia sebelumnya dirampas pada era Turki Utsmani.¹⁵ Namun pernyataan ini berakhir pada Mei 1953, satu tahun pasca Turki bergabung dengan NATO dengan menjalin hubungan bilateral dengan AS¹⁶. Selain keuntungan keamanan, AS juga memberikan keuntungan dari bidang ekonomi kepada Turki. Pada tahun 2001, ketika Turki terkena dampak krisis global, AS mengarahkan dukungan ekonomi AS seperti Dana Moneter Internasional (IMF) selama periode dan pasca krisis keuangan.¹⁷ Keuntungan bantuan ini membantu Turki melewati krisis yang dihadapinya, walaupun pada kenyataannya terdapat kerugian-kerugian yang diakibatkan dari krisis tersebut. Namun saat ini, kondisi menguntungkan di atas tidak mampu membuat Turki bertahan untuk mengikuti setiap arahan dari AS. Pada kenyataannya keputusan Turki tersebut dapat dipertanyakan. Hal tersebut dapat terlihat dari perlawanan yang baru-baru ini dilakukan Turki dalam menanggapi sanksi embargo terhadap Iran. Turki mengabaikan ancaman AS terkait negara-negara yang tidak segera menghentikan impor minyak dari Iran. Lebih lanjut, Presiden Turki mengeluarkan pernyataan

¹⁴ Zanotti, 3.

¹⁵ Muhaimin. "Seteru AS-Turki memanas, Erdogan Akan Cari Sekutu Baru." Sindo News.com. <https://international.sindonews.com/read/1329701/43/seteru-as-turki-memanas-erdogan-akan-cari-sekutu-baru-1534020673>. (diakses pada 24 Oktober 2018).

¹⁶ Mural Ulgul, "The Soviet Influence on Turkish Foreign Policy: 1945-1960," *Florida State University Libraries (Theses)*, (2010): 51.

¹⁷ Nader Habibi, "Turkey and Iran: Growing Economic Relations Despite Western Sactions," *Crown Center for Middle East Studies* 62, (2012): 6.

bahwa ia memiliki alternatif (aliansi) lain jika AS tetap bertahan dengan embargonya, yaitu:

“Before it is too late, Washington must give up the misguided notion that our relationship can be asymmetrical and come to terms with the fact that Turkey has alternatives. Failure to reverse this trend of unilateralism and disrespect will require us to start looking for new friends and allies”. (Recep Tayyip Erdogan, 2018).¹⁸

Pada 5 November 2018, AS menetapkan keputusan terkait sanksi ekonomi yang akan diberikan kepada negara aliansinya. Turki yang merupakan negara aliansi AS memilih tetap melakukan impor minyak dari Iran. Menanggapi hal tersebut, AS menjadikan Turki sebagai salah satu dari delapan negara yang mendapatkan dispensasi untuk diperbolehkan mengimpor minyak dari Iran.

Pada tulisan ini akan dibahas mengenai penyebab mengapa Turki bertindak berlawanan dari nota kesepakatan aliansi AS & NATO, serta bagaimana sikap yang seharusnya Turki tunjukkan kepada AS terkait manfaat yang telah ia dapatkan dari hubungan bilateral tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pasca keluarnya AS dalam kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018 lalu, AS kembali memberlakukan sanksi embargo impor minyak Iran. Selain sanksi embargo, juga ada sanksi ekonomi yang akan diterima negara-negara mitra AS, yang diperuntukan bagi mereka yang tidak mau memutus impor minyak Iran hingga 4 November 2018. Turki menjadi salah satu negara yang enggan memutuskan impor minyak dari Iran, bahkan ia tetap melanjutkan kesepakatan impor minyak dan gas alam Iran, yang mana kontrak tersebut akan *expire* pada 2020, namun diperpanjang Turki hingga 2026. Tindakan Turki yang tidak menuruti keinginan AS, sebagaimana yang seharusnya Turki lakukan sebagai aliansi dari AS menimbulkan keanehan. Padahal, bila dilihat

¹⁸ Recep Tayyip erdogan. “Erdogan : How Turkey Sees the Crisis with the U.S.” The New York Times.com. <https://www.nytimes.com/2018/08/10/opinion/turkey-erdogan-trump-crisis-sanctions.html> (diakses pada 30 Oktober 2018).

dari yang sudah berlalu, aliansi dengan AS memberikan banyak keuntungan bagi Turki dalam berbagai bidang.

Pada 5 November 2018, AS menetapkan keputusan terkait sanksi ekonomi yang akan diberikan kepada negara aliansinya. Turki yang merupakan negara aliansi AS memilih tetap melakukan impor minyak dari Iran. Menanggapi hal tersebut, AS menjadikan Turki sebagai salah satu dari delapan negara yang mendapatkan dispensasi untuk diperbolehkan mengimpor minyak dari Iran.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengapa Turki masih menerima impor minyak dari Iran pasca sanksi embargo AS terhadap Iran 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

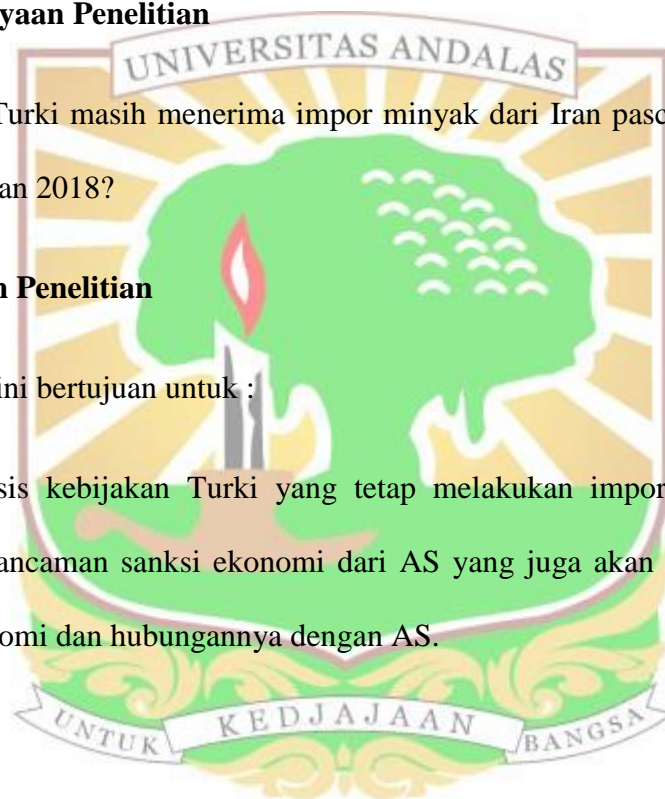
Penelitian ini bertujuan untuk :

Menganalisis kebijakan Turki yang tetap melakukan impor minyak Iran, meski mendapat ancaman sanksi ekonomi dari AS yang juga akan memperparah kondisi krisis ekonomi dan hubungannya dengan AS.

1.5 Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan diantaranya, berupa :

1. Menjadi bahan pengetahuan bagi para penstudi Hubungan Internasional, terkhusus untuk yang akan meneliti tentang topik yang sama.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara.



1.6 Studi Pustaka

Dalam membantu pengembangan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan. Rujukan pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Wanda Adriani Sufri yang berjudul “Analisis Intervensi Turki Pada Konflik Suriah 2011-2016”. Skripsi ini membahas tentang ketidak sinkronan antara strategi luar negeri Turki yang baru “*Zero Problem with Neighbor Strategy*” dengan tindakan yang dilakukan Turki terhadap Suriah. Skripsi ini juga membahas faktor-faktor yang melatar belakangi intervensi Turki pada konflik Suriah. Pasca *Arab Spring* yang membuat beberapa negara di Timur Tengah mengalami konflik, yang tidak terkecuali bagi Suriah yang wilayahnya berbatasan dengan Turki. Dampak dari konflik di Suriah ini telah membuat kondisi sosial politik dari Turki mengalami pergolakan. Namun pada tulisan ini hanya membahas mengenai ketidaksinkronan tindakan Turki dengan strategi luar negerinya dengan menggunakan konsep *state behavior*. Dimana pada skripsi tersebut dikatakan bahwa, Turki memiliki strategi luar negeri ‘*Zero Problems with Neighbors*’ yang berarti bahwa Turki selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, namun cita-cita tersebut menghadapi rintangan ketika *Arab Spring* muncul dan Turki terkena salah satu dampaknya.¹⁹

Rujukan kedua adalah berasal dari artikel jurnal yang ditulis oleh Ali Askerov. “Turkey’s ‘Zero Problems with the Neighbors’ Policy: What is Realistic?”. Artikel ini membahas mengenai masih relevankah apabila *Zero Problem with the Neighbor* ini dilanjutkan oleh Turki. Pada awal kemajuan kekuasaan pada tahun 2002, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah memperkenalkan kebijakan revolusioner di

¹⁹ Wanda Adriani Sufri, “Skripsi Analisis Intervensi Turki Pada Konflik Suriah 2011-2016,” *Universitas Andalas*, (2016): 14.

Turki di berbagai bidang, termasuk urusan luar negeri. Tren baru dalam kebijakan luar negeri difokuskan pada tidak memiliki masalah dengan tetangga. Ini mungkin bisa atau hampir mungkin secara teoritis, tetapi menghilangkan konflik pada abad ini yang panjang dan berakar dengan beberapa negara tetangga tidak akan mudah dalam prakteknya. Pendekatan idealistik / moralistik baru mengharuskan cara-cara baru perumusan kebijakan berdasarkan keuntungan bersama dan konsesi tak terpikirkan di pihak Turki.

Pendekatan baru Ankara telah memberikan arti penting khusus untuk membangun jembatan kepercayaan dengan para tetangga, yang juga tampak menarik bagi para pemimpin politik negara-negara tetangga. Pendekatan idealistik / moralistik ini rentan terhadap perkembangan politik dan ekonomi yang dinamis di kawasan dan dunia pada umumnya.²⁰ Kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan keberlanjutan karena berbagai masalah lama, baru, dan muncul di sekitar Turki dan karenanya, pemerintah harus menyerah secara bertahap dan mengambil kebijakan baru kebijakan luar negeri berdasarkan pendekatan realistik untuk membela kepentingan nasionalnya. Karena pada realita yang terjadi, Turki tetap melakukan intervensinya ke Suriah meskipun itu bertentangan dengan kebijakan luar negeri yang ia miliki.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, tulisan Ali Askerov hanya membahas mengenai ketidakmungkinan masih diterapkannya kebijakan luar negeri *Zero Problem with the Neighbor* dengan memunculkan konflik Suriah sebagai contoh dan bukti nyatanya.

Ketiga, artikel dari Jesse C. Johnson yang berjudul “The Cost of Security: Foreign Policy Concessions and Military Alliance ”. Artikel ini membahas dan menjelaskan

²⁰ Ali Askerov, “Turkey’s ‘Zero Problems with the Neighbors’ Policy: What is Realistic?.” *Contemporary Issue of The Middle East* 4, No. 2, (2017): 152.

kesinambungan antara aliansi militer yang dilakukan suatu negara, yang mana akan mempengaruhi power negara tersebut, apakah semakin meningkat atau menurun. Sangat diakui bahwa aliansi militer dapat memberikan manfaat keamanan yang penting bagi anggotanya. Namun, lebih sedikit perhatian yang diberikan kepada konsesi kebijakan yang harus diberikan negara lain untuk masuk ke dalam aliansi militer. Untuk mempelajari aspek aliansi ini, artikel ini mengembangkan model perundingan tiga-aktor dari pembentukan aliansi yang mengakhiri ancaman eksternal dan konsesi kebijakan. Secara khusus, tawar-menawar negara sasaran dengan calon pembela atas konsesi yang harus dilakukan untuk bersekutu dan kemudian menanggapi penantang potensial.

Model ini menunjukkan bahwa apa yang penting untuk konsesi kebijakan dalam aliansi bukan hanya kekuatan negara yang terancam tetapi kekuatannya relatif terhadap penantangannya dan bagaimana aliansi akan mengubah distribusi kekuasaan.²¹ Saya menguji implikasi dari model ini menggunakan data pada konsesi kebijakan yang dijanjikan yang diformalkan dalam perjanjian aliansi dan menemukan dukungan kuat untuk hipotesis. Lebih khusus lagi, pada artikel ini penulis menemukan bahwa negara-negara bersedia untuk membuat lebih banyak konsesi sebagai pertukaran untuk aliansi ketika mereka tidak mungkin untuk mengalahkan lawan mereka sendirian dan ketika sekutu mereka memiliki pengaruh besar pada kemungkinan dimana mereka akan menang dalam perang. Temuan-temuan ini menyempurnakan teori-teori aliansi yang ada dan menawarkan analisis besar pertama dari konsesi kebijakan dalam aliansi.

²¹ Jesse C. Johnson, "The Cost of Security: Foreign Policy Concessions and Military Alliance," *Journal of Peace Research* 52, No.5, (2015): 666.

Artikel ini membantu penulis dalam memberikan pandangan terkait hubungan aliansi militer dengan kebijakan yang dikeluarkan suatu negara, serta apa yang akan di peroleh oleh negara tersebut bila aliansinya berjalan sempurna. Hal ini diperlukan dalam penelitian yang sedang penulis kerjakan.

Keempat, Tulisan dari Morgan dan Palmer yang berjudul “Two-Good Theory of Foreign Policy: An Application to Dispute Initiation and Reciprocation”. Tulisan ini membahas bagaimana teori kebijakan luar negeri saat ini, yang disampaikan realis, ternyata tidak mampu menjelaskan dengan dinamika isu yang ada saat ini. Sehingga Morgan dan Palmer menurunkan teori baru dari teori kebijakan luar negeri terdahulu, dimana yang diutamakan dari sebuah negara yaitu keamanannya. Ia menurunkan teori kebijakan luar negeri tersebut menjadi *two-good theory*. Teori ini menjelaskan dua tujuan utama dari kebijakan luar negeri suatu negara.

Two-good theory memiliki dua tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya, yaitu *security* dan *proaction*.²² Negara-negara yang digolongkan termasuk negara lemah, cenderung lebih memilih untuk mencari *security*, sedangkan negara yang tergolong kuat cenderung untuk mencari *proaction* dalam setiap kebijakan luar negerinya. Dalam pencarian *security*, negara akan berusaha untuk mempertahankan status *quo* yang sudah ada. Sedangkan dalam pencarian *proaction*, mereka akan berusaha untuk merubah status *quo* yang tidak disukainya. Pada hakikatnya dalam tulisan ini, negara yang mencari *proaction* akan lebih sering untuk memulai konflik.

Kelima, tulisan dari James A. Baker III yang berjudul “*Japanese Security in Twenty-First Century: Whose Job Is It Anyway?*”. Tulisan ini membahas bagaimana pada

²² T. Clifton Morgan dan Glenn Palmer. “A Two-Good Theory of Foreign Policy: An Application to Dispute Initiation and Reciprocation,” *International Interaction: Empirical and Theoretical Research in International Relations* 22, No. 3, (1996): 225.

era saat ini Jepang mendapatkan kekuatannya melalui keamanan. Keamanan ini diberikan oleh negara aliansinya, Amerika.²³ Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori dari Morgan dan Palmer, *two-good theory*. Namun, dalam pencarian keamanannya Jepang juga dibatasi oleh perjanjiannya dengan negara-negara pemenang perang dunia kedua, dimana ia harus mencari dan mendapatkan keamanannya melalui kerjasama ataupun aliansi.

Jepang yang merupakan aliansi dari Amerika, dalam mendapatkan keamanan yang diberikan Amerika, bersedia untuk memberikan apa yang diinginkan Amerika. Ini dikarenakan, Jepang merasa bahwa keamanan merupakan aspek penting yang harus dimiliki negara, sehingga dalam pembuatan kebijakan luar negerinya, untuk mendapatkan keamanan ditengah keterbatasan ia harus menukarkannya dengan apa yang diinginkan negara pemberi keamanan. Pada tulisan ini dijelaskan mengenai bagaimana Jepang mendapatkan keamanannya selama ini melalui Amerika dengan menjaga status *quo*.

Tulisan Baker berbeda dengan penelitian ini, dikarenakan penelitian ini membahas mengenai mengapa Turki masih melakukan impor minyak Iran tahun 2018, meskipun aliansinya Amerika telah melarang seluruh negara terutama mitranya untuk melakukan impor minyak dari Iran. Ini berkaitan dengan teori *two-good* yang disampaikan oleh Morgan dan Palmer, yang juga digunakan oleh Baker dalam tulisannya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Realisme menganalisis kebijakan luar negeri melalui pengamatan yang dibuat berdasarkan atas pertanyaan dimana posisi kekuatan berada, apa kepentingan dari

²³ James, A. Baker III, "Japanese Security in Twenty-First Century: Whose Job Is It Anyway?," *Institute for Public Policy of Rice University*, (2000): 4.

kelompok tersebut, dan bagaimana hubungan antar peranan *power* dalam memainkan dan membangun kedamaian dari seluruh kepentingan yang berselisih?.²⁴

Hal ini didasari dari asumsi dasar realis yang menjelaskan mengenai tiga cara kerja utama dari dunia antara lain adalah pengelompokan yang mana pengelompokan ini dilakukan agar dapat bertahan hidup maka dibutuhkan adanya suatu kelompok yang sama yaitu *nation-state*. Kedua adalah egoisme atau kepentingan, egoisme adalah bentuk dari sifat asli yang ada di dalam diri manusia serta melalui rasa egoisme atas kepentingan dari suatu negara ini maka dapat menuntun jalannya tingkah laku politik dari suatu negara dalam menjalankan kerjasama. Ketiga adalah sentralisasi kekuatan, sentralisasi kekuatan ini merupakan dasar dari jalannya sebuah politik.

Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang diambil negara terhadap lingkungan pada kondisi eksternal negara, namun terlebih dahulu melihat kondisi dari negaranya sebelum merumuskan dan membuat kebijakan.²⁵ Negara terlebih dahulu harus melihat dari faktor kepentingan domestik sebelum merumuskan kebijakan luar negerinya. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya sikap-sikap merugikan yang akan diberikan oleh negara lain, yang merasa dirugikan atas kebijakan yang diambil negara tersebut. Selain pada pengaruh eksternal, kita juga harus memahami bahwa proses pengambilan keputusan dari pengaruh internal ke negara bagian lain akan mempengaruhi perilaku dari negara bagian yang dituju.²⁶ Perilaku kebijakan luar negeri dari negara juga akan

²⁴ Wohlforth William C, "Realism and foreign policy in, Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, Foreign Policy, Theories . Actors . Cases," *Oxford*, (2012): 27.

²⁵ Sheriff F. Folarin, "The Politics of International Visibility and Relevance: An Overview of Nigeria's Role Conceptions in World Politics," *African Studies Review*, (2011): 8.

²⁶ Morgan dan Palmer, 226.

memjelaskan jenis keputusan kebijakan luar negeri lainnya, seperti perilaku aliansi, pembelanjaan pertahanan, kebijakan perdagangan, dan sebagainya.²⁷

Kedua, mereka yang berusaha memahami penyebab perang telah lebih memfokuskan pada perilaku negara-negara yang terlibat dalam perselisihan atau krisis.²⁸ Pada hal ini dilihat bagaimana besar dan kecilnya suatu masalah dapat memicu perang, dan bagaimana tingkat keparahan dari masalah tersebut. Jika kita ingin menentukan tingkatan bahwa krisis tertentu akan berakhir dalam perang, kita harus memahami terlebih dahulu, pada tingkat umum, berdasarkan tingginya krisis, melalui bagaimana, mengapa, dan kapan krisis itu meningkat.

Konsep hubungan internasional terjadi di ruang masalah multidimensional, dimana didalamnya ada titik status *quo* pada setiap negara. Pada setiap negara yang diberikan akan merasa puas dengan beberapa aspek status *quo* dan merasa tidak puas dengan yang lainnya. Pada pengembangan teori kebijakan luar negeri, Morgan dan Palmer memiliki dua asumsi. Asumsi pertama adalah negara mengejar dua jenis tujuan umum melalui kebijakan luar negerinya. Beberapa upaya negara akan dikhususkan untuk mempertahankan aspek-aspek status *quo* yang disukainya - mengacu pada jenis-jenis perilaku ini sebagai pencarian keamanan. Sisa upaya negara akan dikhususkan untuk mengubah aspek-aspek status *quo* yang tidak disukai. Morgan dan Palmer, memberi label perilaku ini sebagai pencarian proaktif dan berasumsi bahwa setiap tindakan kebijakan luar negeri di mana suatu negara terlibat dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan atau meningkatkan proaktif, dan bahwa seluruh kebijakan yang diadopsi oleh negara dirancang untuk memberikan campuran yang disukai, keamanan dan proaksi.

²⁷ Ibid, 228.

²⁸ Ibid, 226.

Morgan dan Palmer menekankan bahwa setiap tindakan tertentu, seperti pembentukan aliansi atau inisiasi konflik, dapat berupa pencarian keamanan atau pencarian proaksi, tergantung pada keadaan. Morrow, misalnya, berpendapat bahwa dalam aliansi asimetris, kekuatan yang lebih kuat adalah perdagangan keamanan untuk otonomi (*proaction*) sementara yang lemah adalah perdagangan otonomi (*security*) untuk keamanan.²⁹ Demikian pula, konflik yang dimulai dengan maksud memaksa perubahan dalam pemerintahan di negara yang lebih lemah akan menjadi pencarian proaksi sementara konflik yang diprakarsai melawan negara yang kuat untuk menjaga apa yang sudah dimiliki, dan akan mencari keamanan.

Asumsi kedua adalah bahwa lingkungan kebijakan luar negeri menentukan batas kemampuan negara untuk mengejar keamanan dan proaktif. Salah satu faktor lingkungan yang penting adalah kekuatan atau kemampuan negara, relatif dibandingkan dengan yang lain. Artinya, negara yang lebih mampu mengejar lebih banyak proaksi dan keamanan dari pada negara yang lebih lemah. Asumsi ini mengenai pengorbanan antara keamanan dan proaksi. Pada realis tradisional dalam hubungan internasional, tujuan utama negara adalah untuk memberikan keamanan bagi negara. Anggapannya adalah bahwa kekuatan besar lebih mampu menyediakan keamanan mereka dari pada kekuatan kecil. Pada intinya, ini menangkap gagasan umum bahwa lebih mudah untuk mencegah perubahan status *quo* dari pada membawa perubahan tersebut.

Tujuan dari pengembangan teori kebijakan luar negeri yang berangkat dari asumsi dasar realis, ialah agar mampu menjelaskan berbagai perilaku (dari eskali konflik ke pembentukan aliansi) dan untuk memperhitungkan interaksi faktor lingkungan (seperti, distribusi kekuasaan) dengan faktor politik internal (seperti, struktur

²⁹ Ibid, 227-228.

kelembagaan) untuk menjelaskan perilaku ini.³⁰ Namun Morgan dan Palmer dalam pengembangan teori kebijakan luar negerinya menggabungkan antara realisme, dimana ada power (*proaction*) dengan neorealisme (*security*). Hal ini dikarenakan konflik yang berkembang di dunia internasional saat ini lebih kompleks.

1.7.1.1 *Two-Good Theory*

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa Turki masih melakukan impor minyak dari Iran yang terkena sanksi embargo ekonomi dari AS, padahal sejak sebelum perang dunia kedua berlangsung, hingga status Turki yang tergabung dalam keanggotaan di NATO, Turki merupakan aliansi dari AS, peneliti menggunakan teori *two-good* dalam menjawab fenomena ini.

Pada asumsi dasar yang dijabarkan Morgan dan Palmer, dimana ada dua tujuan yang berusaha didapatkan suatu negara melalui kebijakan luar negeri, pencarian keamanan (*security*) dan pencarian proaksi (*proaction*). Asumsi dasar ini yang akhirnya melahirkan *two-good theory*.³¹ Mengidentifikasi perilaku dan kondisi yang dapat diklasifikasikan sebagai pencarian keamanan dan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencarian-tujuan. Satu jalan akan mengikuti Morrow, yang berpendapat bahwa negara-negara besar adalah perdagangan keamanan untuk proaksi (otonomi), dan negara-negara kecil proaktif untuk keamanan, dalam aliansi asimetris.

Two-good theory juga akan melihat bagaimana suatu negara akan berusaha memenuhi kebutuhan negaranya dengan berbagai cara, salah satunya melalui tindakan aliansi. Apabila terjadi ketidakmampuan negara pemberi dalam memberikan kebutuhan utama dari negara penerima, maka akan terjadi tindakan pergeseran aliansi, atau pergeseran kesetiaan yang dilakukan oleh negara penerima.

³⁰ Morgan dan Palmer, 225.

³¹ Ibid.

Hal ini akan dijabarkan melalui tindakan yang dilakukan negara, berdasarkan dari pengelompokkan tujuan negara dari kebijakan luar negerinya;

a. Security (keamanan)

Status *quo* yang dimiliki setiap negara, membuat negara memiliki standar tersendiri terhadap pemenuhan kebutuhan negaranya.³² Hal ini termasuk pada, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh hilang ataupun berkurang dari sebuah negara. Misalnya saja, suatu negara memiliki standar keamanan yang harus setara dengan nilai delapan, namun ketika nilai ini berkurang, negara akan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk dapat mencapai nilai delapan kembali. Beberapa upaya negara akan dikhususkan untuk mempertahankan aspek-aspek status *quo* yang disukainya, mengacu pada jenis-jenis perilaku ini sebagai pencarian keamanan.³³

Kesimpulan dari pembahasan diatas, pertama ketika suatu negara bergerak keluar dari wilayahnya, mereka akan terlibat dalam peningkatan jumlah kebijakan luar negeri.³⁴ Negara-negara yang berada pada daerah perbatasan yang lebih tinggi akan berusaha mencari lebih banyak keamanan dan akan lebih banyak tindakan yang dilakukan, dari pada negara-negara yang berada diperbatasan yang lebih rendah.

Kedua, dampak pada kebijakan luar negeri suatu negara atas peningkatan ataupun penurunan yang diberikan dalam kemampuannya akan bervariasi, tergantung pada kekuatan negara. Setiap peningkatan dalam kemampuan relatif harus mengarah pada perilaku pencarian keamanan dan tindakan yang lebih, usaha yang diberikan oleh suatu negara tergantung dari tingkat kemampuan negara tersebut.³⁵ Negara yang cenderung lemah yang memperoleh kekuasaan diharapkan untuk memberikan

³² Ibid, 229.

³³ Ibid, 227.

³⁴ Ibid, 234.

³⁵ Ibid, 235-236.

sebagian besar peningkatan ini untuk mengejar atau mendapatkan keamanannya. Kebijakan konvensional didasarkan pada asumsi bahwa semua negara menilai keamanan di atas segalanya dan menegaskan bahwa negara-negara akan beralih ke pengejaran lain hanya setelah keamanan mereka terjamin.

Perubahan yang diberikan baik dalam peningkatan maupun penurunan dalam kemampuan negara, akan memiliki sedikit dampak pada kebijakan mencari keamanan dari negara yang kuat dari pada negara yang lemah. Kemungkinan bahwa suatu negara akan terlibat dalam perilaku pencarian keamanan (misalnya, membentuk aliansi dengan negara yang kuat atau bereaksi terhadap inisiasi konflik lain) akan dipengaruhi oleh perubahan dalam kemampuan negara itu, tetapi besarnya dampak ini akan bervariasi, berbanding terbalik dengan kekuatan negara. Artinya, negara yang kurang kuat akan lebih peduli dengan perubahan kecil dalam tingkat keamanan mereka dari pada negara yang lebih kuat.

Adapun syarat dari suatu negara dapat dikatakan mencari keamanan dalam kebijakan luar negerinya, apabila tidak ditemukannya tindakan-tindakan inisiasi konflik yang dilakukan negara tersebut.³⁶ Tidak hanya itu, negara-negara yang memilih pencarian keamanan tidak memiliki indikasi perubahan aliansi (*change*) dari sikap dan tindakan yang dilakukannya, negara akan cenderung bertahan dan bersikap baik kepada negara aliansinya saat ini.³⁷ Hal ini terjadi karena aliansi saat ini mampu memberikan apa-apa saja yang dibutuhkan, dan yang diperlukan negara tersebut.

b. Proaction (proaksi)

³⁶ Ibid, 227.

³⁷ Ibid, 227-228.

Proaksi adalah upaya untuk mengubah aspek-aspek tertentu dari resolusi isu yang ada saat ini.³⁸ Proaksi mensyaratkan suatu negara mengeluarkan sumber dayanya untuk mengubah kebijakan dari negara target.³⁹ Pada status *quo* yang dimiliki setiap negara, beberapa negara yang dikategorikan memiliki kemampuan (kuat) untuk mengubah aspek-aspek dari status *quo* tersebut, akan berusaha mengubahnya. Upaya negara ini akan dikhususkan untuk mengubah aspek-aspek status *quo* yang tidak disukainya.⁴⁰ Sehingga negara yang cenderung kuat, akan memberikan sebagian besar keuntungan yang dinikmatinya untuk mengejar proaksi.

Tindakan pencarian proaksi dalam kebijakan luar negeri suatu negara harus memiliki dua unsur penting sehingga dapat dikatakan pencarian proaksi. Pertama, adanya insiasi konflik yang diciptakan oleh suatu negara pencari proaksi, dan melihat apakah negara target merespon atau tidak tindakan inisiasi tersebut.⁴¹ Kedua, adanya indikasi pembentukan aliansi, baik itu pertukaran maupun pembentukan baru dari sebuah aliansi.⁴²

Tindakan proaksi juga dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama adanya ketidakselarasan atau ketidakefisienan dari hubungan yang sudah ada.⁴³ Ketidakselarasan atau ketidakefisienan ini dapat berupa menurunnya tingkat efisiensi dari hubungan yang sudah ada, dikarenakan berubahnya fokus, tujuan, serta kebutuhan dari masing-masing negara. Kedua, meningkatnya kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.⁴⁴ Kapabilitas yang dimaksud, dilihat dari kekuatan militer, posisi tawar, *power* yang dimiliki (regional dan internasional), dan yang terakhir

³⁸ Ibid, 238.

³⁹ Ibid, 228.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid, 231-233.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid, 241.

⁴⁴ Ibid, 241-242.

hubungan negara pencari proaksi dengan negara dari kelompok yang bersebrangan dengan negara aliansinya.

Pencarian proaksi yang dilakukan suatu negara dimaksudkan salah satunya dengan memberikan apa yang diperlukan negara yang dituju. Ini dapat berupa keamanan, yang mana didalamnya ada aspek-aspek lain selain dari keamanan dalam segi militer. Melalui tulisannya yang berjudul *Nontraditional Securit: Redefining State-Centric Outlook*, Singh dan Nunes mengatakan bahwa ada aspek-aspek lain yang menyusun isu keamanan, diantaranya kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial, HAM, kekurangan gizi, kondisi alam, politik dan juga ekonomi.

Dalam upaya pencarian proaksi, Morgan dan Palmer beragumen mengenai munculnya konflik salah satunya, karena konflik akan dimulai terutama oleh mereka yang berusaha mengubah status *quo*, inisiasi konflik dipandang sebagai kegiatan pencarian-tujuan.⁴⁵ Jadi, konflik yang tercipta merupakan salah satu bentuk kegiatan pencarian tujuan yang dilakukan oleh negara-negara kuat. Sengketa atau perselisihan yang diciptakan oleh negara kuat ini akan direspon oleh negara target yang berusaha untuk mempertahankan status *quo* yang dianggap menguntungkan. Penolakan perubahan inilah yang akhirnya akan memunculkan konflik dan perselisihan bilateral, yang dapat merambat menjadi konflik yang lebih besar.

Morgan dan Palmer membagi negara menjadi kekuatan besar dan kekuatan kecil, yang mana dilihat dari data *Militarized Interstate Dispute* (MID). MID merupakan serangkaian interaksi antara atau diantara negara-negara yang melibatkan ancaman untuk menggunakan kekuatan militer, menampilkan kekuatan militer, dan

⁴⁵ Ibid, 227.

penggunaan kekuatan militer yang sebenarnya.⁴⁶ MID melihat bagaimana konflik bilateral berubah menjadi konflik multilateral. Data MID melihat inisiasi konflik tidak harus selalu menggunakan kekuatan militer saja, namun juga melihat dari setiap konflik yang terjadi meski tidak menggunakan kekuatan militer. MID juga melihat dari data tentang kemampuan negara.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai sikap Turki yang terindikasi mencari proaksi dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini didasari oleh terpenuhinya syarat dari suatu negara dapat dikatakan mencari proaksi pada kebijakan luar negerinya, diantaranya Turki melakukan tindakan inisiasi konflik kepada AS melalui isu embargo terhadap Iran, dan adanya tindakan serta sikap Turki yang terindikasi berupaya melakukan perubahan aliansi. Berdasarkan pencarian proaksi, sikap ini dilatarbelakangi oleh hubungan Turki-AS yang sudah tidak efisien, dan adanya peningkatan kapabilitas yang dimiliki Turki.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna ataupun data bukan perluasan data. Di samping itu, metode kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data statistik.⁴⁷ Cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan pidato-pidato yang disampaikan oleh tokoh-tokoh penting dalam penelitian ini yang

⁴⁶ Ibid, 235.

⁴⁷ Merriam, di dalam Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Makara, Sosial Humaniora, " Universitas Indonesia 9, No. 2, (2005): 57-65.

membahas tentang mengapa Turki masih melakukan impor minyak dari Iran meski dengan ancaman sanksi ekonomi lagi dari Amerika Serikat.

Adapun jenis penelitian ini adalah eksplanatif analisis. Penelitian berjenis eksplanatif analisis yaitu penelitian yang berfokus menganalisis keterkaitan atau pengaruh antar variabel dalam mengkaji suatu isu atau fenomena secara lebih mendalam dan terperinci.⁴⁸ Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk menjelaskan mengapa Turki masih melakukan impor minyak dari Iran, meski Turki mendapat ancaman sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, setelah sanksi embargo yang diterima Turki pada Agustus 2018 lalu yang juga akan mempengaruhi hubungannya dengan AS, dimana AS merupakan aliansi dari Turki.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu penelitian yang digunakan dalam “Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Pasca Sanksi Embargo Amerika Serikat terhadap Iran Tahun 2018” adalah di tahun 2018. Turki yang merupakan aliansi dari AS di NATO, dimana hubungan kedua negara ini sangat baik meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Hal ini ditandai dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan kedua negara dalam berbagai bidang. Pada tahun 2010, kedua pemerintah meluncurkan kerangka kerja Turki-AS untuk *Strategic Economic and Commercial Cooperation* (FSECC), yang mensyaratkan inisiatif tingkat kabinet baru untuk mengatasi tantangan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan keterlibatan sektor swasta yang lebih terstruktur melalui Dewan Bisnis yang terdiri dari perwakilan dari kedua

⁴⁸ Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Malang: Kencana Prenada Media Group.2009), 59-60.

negara.⁴⁹ kerjasama yang dilakukan Turki-AS tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada bidang keamanan dan militer, agrikultur, teknologi, *science* dan lainnya.

Pada tahun 2018 mulai diberlakukannya kembali sanksi embargo ekonomi kepada Iran oleh AS, pasca keluarnya AS dalam kesepakatan pembatasan nuklir Iran pada Mei 2018. Pada tahun ini Turki yang merupakan negara aliansi dari AS bertindak tidak menuruti keinginan AS untuk mengakhiri kerjasama impor minyaknya dari Iran. Padahal AS telah memberi ancaman bagi negara mitranya yang masih melakukan kerjasama impor minyak Iran, maka akan diberlakukan sanksi-sanksi ekonomi.

Pasca sanksi embargo terhadap Iran tahun 2018 dan dilanjutkan dengan keluarnya ancaman AS terhadap negara mitranya yang masih melakukan kerjasama impor minyak Iran, Turki malah mengeluarkan kebijakan luar negeri yang bertolak belakang dengan keinginan AS. Turki malah memperpanjang kontrak kerjasama impor minyak dari Iran hingga 2026. Hubungan Turki dengan AS semakin memanas setelah munculnya tindakan-tindakan saling menyerang lainnya yang dikeluarkan kedua negara.

Penelitian ini akan menggunakan teori *two-good* untuk menjelaskan alasan mengapa Turki masih melakukan impor minyak dari Iran meski telah ada ancaman sanksi ekonomi dari AS apabila negara mitranya masih melakukan impor minyak dari Iran hingga 4 November 2018.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

⁴⁹ Thomas J. Donohue dan Umit Boyner. "U.S.-Turkish Economic Relations In A New Era: Analysis and Recommendations For A Stronger Strategic Partnership." *Turkish Industry & Business Association*. (2012): 5.

Unit analisis atau dapat disebut sebagai variabel dependen; merupakan objek yang akan dianalisis atau dijelaskan dalam sebuah penelitian.⁵⁰ Berdasarkan penelitian “Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Pasca Sanksi Embargo Amerika Serikat terhadap Iran Tahun 2018”; maka, unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Turki.

Tingkat analisis atau level analisis merupakan acuan posisi dari unit yang akan diteliti.⁵¹ Menurut Mochtar Mas’oed, tingkat atau level analisis dibagi menjadi lima yaitu individu (menganalisis perilaku dari tokoh individu yang mempengaruhi suatu keputusan melalui persepsi, kepribadian, atau tingkah laku, seperti presiden dan kepala pemerintahan); kelompok (menganalisis perilaku kelompok di dalam hubungan internasional, seperti organisasi internasional); negara-bangsa (menganalisis tentang interaksi dan dinamika proses pembuatan keputusan suatu negara di dalam hubungan internasional); pengelompokan negara-negara atau regional (menganalisis adanya interaksi antar-negara yang berupa seperti aliansi, persekutuan perdagangan, dan lain-lain), dan sistem internasional (menganalisis suatu fenomena atau dinamika perilaku aktor di dalam sistem internasional, seperti hukum internasional).⁵²

Penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Pasca Sanksi Embargo Amerika Serikat terhadap Iran Tahun 2018” menggunakan level analisis atau tingkat analisis yaitu negara. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini lebih berfokus kepada analisis dari perilaku suatu negara yaitu analisis tindakan dari

⁵⁰ Laura Roselle, dan Sharon Spray, *Research and Writing in International Relations* (London: Longman Pearson, 2008), 11-12.

⁵¹ Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi” (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1990), 35-286.

⁵² Ibid.

negara Turki terhadap sanksi embargo ekonomi yang diterima Iran, dengan ancaman sanksi ekonomi dari AS bila tetap melakukan impor minyak dari Iran.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data*; yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Adapun cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan mencari data-data melalui studi kepustakaan (*literature review*); seperti buku, jurnal, buku dan jurnal online, situs web resmi, arsip pemerintahan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Sebelum menganalisis kebijakan luar negeri Turki pasca embargo ekonomi terhadap Iran pada tahun 2018, peneliti mencari data dan fakta awal hubungan Turki-Iran sebelum Iran mendapatkan sanksi embargo ekonomi dari AS pada tahun 2018. Hal ini akan berkaitan dengan sikap yang diambil Turki pasca sanksi yang diterima Iran. Penulis juga akan mencari data kondisi internal dari Turki dan Iran dalam upaya melihat keterkaitannya dengan tindakan yang diambil Turki, yang nantinya akan menjadi jawaban dalam pertanyaan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti membandingkan data-data serta informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Di samping itu, pada bagian latar belakang, peneliti menggambarkan hubungan antara Turki dan Iran pada awalnya sebelum Iran mendapatkan sanksi embargo ekonomi dari AS pada tahun 2018. Pada masa ini, akan dilihat bagaimana hubungan ini

akhirnya nanti akan memunculkan perubahan atas sikap Turki kepada Iran setelah adanya sanksi embargo yang diterima Iran.

Untuk menemukan jawaban dari analisis kebijakan luar negeri Turki pasca sanksi embargo terhadap Iran pada tahun 2018, peneliti akan menganalisis mengapa Iran mendapatkan sanksi embargo dari AS, dan bagaimana kondisi Turki saat ini yang akan mengarahkan tulisan ini pada jawaban atas pertanyaan mengapa Turki tetap melakukan impor minyak dari Iran. Penulis akan menggunakan teori *two-good* dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menggambarkan secara menyeluruh dan terperinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kebijakan Luar Negeri Turki

Bab ini akan menjelaskan bagaimana arah Kebijakan Luar Negeri Turki sebelum abad 20 dan setelah abad 20. Pada bab ini juga akan melihat bagaimana Turki melihat pentingnya aliansi, serta hubungan negara Turki dengan aliansinya.

BAB III Dinamika Hubungan Bilateral Turki – Amerika Serikat

Bab ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan bilateral antara Turki dan Amerika Serikat, dan apa saja keuntungan yang didapat Turki dari menjaga hubungan baiknya dengan Amerika Serikat

BAB IV Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki yang Masih Menerima Impor Minyak Iran 2018

Bab ini menjelaskan analisis dari tindakan Turki pasca embargo ekonomi yang diterima Iran dari AS, dimana Turki lebih memilih mengabaikan ancaman AS, terkait sanksi yang akan diterima negara-negara yang tetap melakukan impor minyak dari Iran hingga 4 November 2018.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang akan mencakup ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini dan memberikan garis besar terhadap kontribusi apa yang dapat diberikan terhadap lingkungan akademis maupun pemangku kepentingan.



